

**TATA KELOLA KONFLIK DALAM PILKADA SERENTAK  
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2017**

Disusun dan diusulkan oleh

**FIRMADI MUSLIMIN**

Nomor stambuk: 105640159812



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**TATA KELOLA KONFLIK DALAM PILKADA SERENTAK KABUPATEN  
TAKALAR TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ilmu Pemerintahan**



**Disusun dan Diajukan Oleh**

**FIRMADI MUSLIMIN**

**Nomor Stanbuk : 105640159812**

**Kepada**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

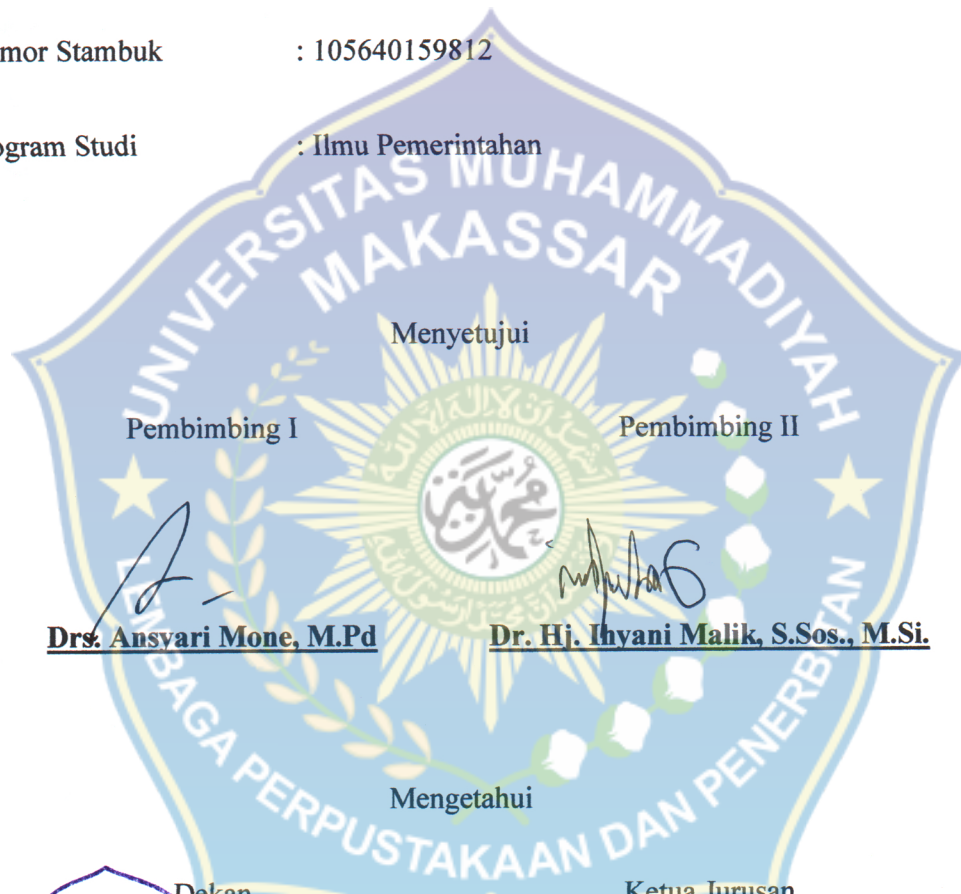
**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tata Kelola Konflik Dalam Pilkada Serentak  
Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Firmadi Muslimin

Nomor Stambuk : 105640159812

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ansyari Mone, M.Pd

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

Mengetahui

Dekan

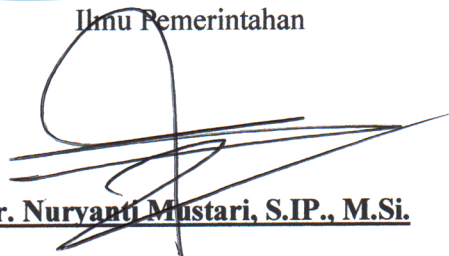
Ketua Jurusan

Rektor Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si.

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor :0047/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2019.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**



**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)



2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd



3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



4. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Firmadi Muslimin

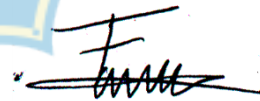
Nomor Stambuk : 105640159812

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 15 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



FIRMADI MUSLIMIN

## ABSTRAK

**Firmadi Muslimin 2019: Tata Kelola Konflik Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Takalar Tahun 2017** (dibimbing oleh; Drs. Ansyari Mone, M.Pd & Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.)

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh Konflik dan Tata Kelola Konflik dalam Pilkada Serentak Kabupaten Takalar, jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan informan penelitian 5 orang dari KPU dan Bawaslu Kab Takalar.

Tehnik yang digunakan dalam himpunan data dalam penelitian berupa, observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap informan, data tersebut di analisis secara deskriptif kepada informan dengan melakukan wawancara dengan mengecek kembali data tersebut untuk lebih memahami secara mendalam serta berpedoman pada teori-teori yang sesuai dan data tersebut dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan yang bermutu dan kredibel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa konflik yang terjadi pada Pilkada Serentak Kabupaten Takalar, yaitu adanya isu tentang pemilih yang tidak tervaidasi dan nomor KTP yang tidak sesuai dengan format. Adapun pelanggaran sebagai salah satu penyebab konflik yang ada yaitu adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, terjadinya mobilisasi massa dan terdapatnya ribuan pemilih yang ada di dalam DPT (daftar pemilih tetap) tetapi tidak terdaftar dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar. Adapun Tata kelola konflik dalam pilkada serentak Kab. Takalar, dalam aspek pengawasan, bawaslu melakukan pendekatan terhadap isu - isu yang terkait, seperti Politik Uang, netralitas ASN, Hak hak Pemilih, dana – dana kampanye dan evaluasi IKP Pilkada 2017. DPT sebagai dasar data Pemilih agar dapat di evaluasi dengan baik agar tidak terjadi kesalahan data, dan penjelasan atas regulasi dengan pelaksanaan pilkada harus dipertegas.

**Keyword : Konflik, Pilkada, Pemilu**



## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul “Tata Kelola Konflik Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Takalar Tahun 2017” dapat diselesaikan. Salawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Drs. H. Muslimin dan ibu Hj. St. Hatija yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudariku tercinta Firmansyah Musllimin dan Firmayanti Muslimin yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam

menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Drs. Ansyari Mone, M.Pd dan Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Nuryanti Mustari, S.IP., M. Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
5. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I. Selaku sekertaris Jurusan Ilmu Pemerintahan
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Seluruh jajaran KPU dan Bawaslu Kab. Takalar, yang telah bekerjasama selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



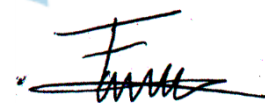
9. Seluruh saudara angkatan 2012 dan adik-adik pada Ilmu Pemerintahan tak terkecuali saudara-saudaraku, sahabat-sahabat dan teman-teman, yang telah menjadi keluarga bagi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tak ada kekuatan dan kesempurnaan, semuanya hanya milik Allah SWT, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan.

*Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 15 Agustus 2019



Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	7
B. Kerangka Pikir .....	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Pemilihan Informan.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Keabsahan Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian .....	44
B. Gambaran Konflik dan cara Tata Kelola Konflik.....	53
C. Tata Kelola Konflik Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Takalar .....	61

BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh.

Pada masa Orde Baru praktis implementasi otoriterisme lebih dominan untuk memilih kepala daerah di wilayah propinsi maupun Kabupaten/Kotamadya. Pola-pola top down dan patrimonial begitu mendominasi politik Indonesia, sehingga sangat wajar tuntutan reformasi yang paling esensial adalah mengganti praktek-praktek otoriterisme dengan mekanisme yang lebih demokratis, yaitu mekanisme pilkada. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

Pada perjalanannya mekanisme pilkada mengalami perubahan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dinamika ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan seperti 'perselingkuhan' wakil rakyat (DPRD) dengan calon Bupati/ Walikota/ Gubernur yang berimbas kepada korupsi politik dan akuntabilitas yang buram karena persekongkolan elit politik meniadakan transparansi tetapi justru menyemarakkan politik uang. Hal ini dimungkinkan karena DPRD lah yang memilih kepala daerah. Alasan tersebut menjadi puncak ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pilkada tidak langsung. Dengan begitu terjadi perubahan dari UU No. 22/1999 digantikan dengan UU No. 32/2004 yang mengatur pilkada secara langsung.

Pilkada langsung serentak menjadi langkah baru dalam demokratisasi di Indonesia. Setelah debat panjang di DPR untuk menentukan apakah tetap diselenggarakan pilkada atau mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, yang salah satu pertimbangannya adalah besarnya biaya penyelenggaraan pilkada, maka pilkada serentak merupakan jalan tengah untuk tujuan jangka panjang untuk menciptakan pemilihan kepala daerah yang lebih efektif dan efisien. Keputusan untuk melaksanakan pilkada serentak memang baru disahkan pada tahun 2015, dan gelombang pertama pilkada serentak akan dimulai pada bulan Desember 2015 di 271 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2015 dan semester I-2016. Gelombang kedua pilkada diadakan pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang akhir masa jabatan semester II-2016 dan 2017. Gelombang ketiga pilkada diadakan pada Juni 2018 untuk AMJ 2018 dan 2019. Adapun pilkada serentak nasional disepakati diadakan pada 2027.

Pengalaman penyelenggaraan pilkada di Indonesia bukan tanpa pengalaman konflik dan kerusuhan. Sejak diselenggarakan pertama kali pada Juli 2005, tak kurang dari 1.027 pilkada diselenggarakan di negeri ini. Tahun 2012, dilaksanakan 73 pilkada (enam pemilihan Gubernur dan 67 pemilihan Bupati/Wali Kota). Data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) Indonesia menunjukkan sejak tahun 2005 hingga 2014, di seluruh wilayah Indonesia, terjadi 2570 konflik terkait pemilihan dan jabatan, dalam berbagai bentuk konflik dan tersebar di seluruh Indonesia. Dua tahun pertama penyelenggaraan Pilkada (2005-2007), setidaknya terdapat 98 dari 323 daerah yang menyelenggarakan Pilkada dirundung persoalan. Tak kurang dari penyelenggaraan 21 Pilkada berakhir bentrokan dan kerusuhan. (Kompas. 28 Juni 2013).

Dalam kaitan itu, setidaknya ada 5 (lima) sumber konflik potensial, baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun pengumuman hasil Pilkada. Pertama, konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah, dan darah. Kedua, konflik yang bersumber dari kampanye negatif antar pasangan calon kepala daerah. Ketiga, konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. Keempat, konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil Pemilu. Kelima, konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan Pilkada (Haris, 2005). Kelima sumber konflik tersebut juga menjadi potensi konflik penyelenggaraan Pilkada serentak di berbagai daerah. Dalam konteks tersebut, kebutuhan atas kapasitas mengelola konflik pilkada menjadi penting.



Kabupaten Takalar merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak pada 15 Februari 2017 diikuti oleh dua pasangan kandidat. Mereka adalah nomor urut 1, Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim dan nomor urut 2, Syamsari Kitta-Ahmad Daeng Se're yakni Koalisi 88; Golkar, Demokrat, Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Bulan Bintang (PBB) dan Gerindra. Eksistensi partai-partai besar ini tidak diragukan lagi memiliki afiliasi dengan media nasional serta jaringan medianya sampai di tingkat lokal. Karena itu dimungkinkan penggiringan opini publik melalui media lokal bisa terjadi. Di usung oleh beberapa partai Pasangan nomor urut dua Syamsari Kitta-Ahmad Daeng Se're memperoleh suara dalam pilkada terbanyak yakni 50.58% 15 februari 2017. Sedangkan pasangan Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim nomor urut satu pilkada sebanyak 49%42 suara.

Yang perlu dikritisi dalam konteks pilkada kabupaten Takalar, sekaligus argumen mengapa Kabupaten Takalar dipilih sebagai obyek penelitian adalah bagaimana tata kelola konflik dalam pilkada 2017 tersebut. Sehingga beberapa ulasan diatas mengenai pilkada di Kabupaten Takalar menuai beberapa konflik dan hal itulah yang menjadi alasan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul Tata Kelola Konflik Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Takalar Tahun 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab konflik dalam pilkada serentak Kabupaten Takalar tahun 2017?
2. Bagaimana tata kelola konflik dalam pilkada serentak Kabupaten Takalar tahun 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik dalam pilkada serentak Kabupaten Takalar tahun 2017.
2. Untuk mengetahui tata kelola konflik dalam pilkada serentak Kabupaten Takalar tahun 2017

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yakni sangat diharapkan mendapatkan sebuah hasil yang berguna sebagai alat informasi yang

mempermudah untuk mendapatkan sebuah pengetahuan tentang tata kelola konflik dalam pilkada serentak di **Kabupaten** Takalar.

## 2. Manfaat praktisi

Penelitian ini diharapkan agar berguna sebagai alat untuk menguraikan serta menjadi pokok penyelesaian dari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai tata kelola konflik dalam pilkada serentak di Kabupaten Takalar apakah sudah berjalan secara optimal di masyarakat dan memberikan citra yang baik bagi Kabupaten Takalar. Sehingga dapat berguna untuk memberikan sebuah ageninformasi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian berikutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Konflik**

###### **a. Pengertian Konflik**

Konflik merupakan suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik merupakan upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai.

Konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Wirawan (2010:5) mendefinisikan konflik sebagai proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Konflik juga dapat diartikan sebagai situasi dimana satu “pihak” atau lebih (yang terdefinisi atau terstruktur) merasa memiliki tujuan yang saling bertentangan. Setiap konflik

terdiri atas tiga komponen: ketidaksesuaian tujuan, sikap dan perilaku. Teori conflict behaviour ini dikemukakan oleh Mitchel (1981:17) dalam Jolle Demmers(Theories of Violent Conflict, 2012:5)

*A conflict is „any situation in which two or more “parties”(however defined or structured) perceive that they possess mutually incompatible goals”Any conflict consists of three component parts: goal incompatibility, attitudes and behaviour.*

Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya-sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi.

Dalam manajemen konflik, penyelesaian sengketa pilkada ini sebenarnya ada opsi lain yaitu konsensus. Dalam opsi ini adanya pemahaman bersama, di mana semua pihak harus duduk bersama dan menyelesaikan masalah secara terbuka, dengan kepala dingin, transparan, serta menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan. Keyakinan, nilai-nilai, dan norma, serta tujuan otonomi daerah menjadi suatu landasan ideal untuk menuju suatu penyelesaian dalam sengketa. Dengan begitu perubahan sosial terjadi dalam ruang lingkup konsensus dan berlangsung secara damai. Karena itu, guna menghindari sengketa pilkada dalam konflik politik dibutuhkan kedewasaan dalam berpolitik dan kematangan para tokohnya. Selain itu, mesti ada kesepakatan awal bagi para calon untuk siap

menang dan kalah –selain deklarasi damai–sehingga pemenang dengan perolehan suara berapa pun harus diterima.

Menurut Ralf Dahrendrof, dalam hubungan-hubungan kekuasaan beberapa orang memiliki kekuasaan sedangkan yang lain tidak. Konflik terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata sehingga bertambahnya kekuasaan pada suatu pihak akan dengan sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Dahrendorf berpendapat bahwa ada dua macam tataran konflik. (Ralf Dahrendrof ; 2000 )

1. Konflik laten, yakni pertentangan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terwujud dalam konflik terbuka.
2. Konflik manifest, jika konflik yang pertama tadi mewujud kedalam pertikaian terbuka.

Fungsi konflik menurut Dahrendrof adalah menciptakan perubahan dan perkembangan. Menurutnya, sekali kelompok-kelompok yang bertentangan muncul maka mereka akan terlibat dalam tindakan-tindakan yang mengarah pada perubahan di dalam struktur sosial, jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal. Jika konflik itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan, maka perubahan struktural akan terjadi secara tiba-tiba. Dahrendrof juga menyatakan bahwa masyarakat bersisi ganda, yakni memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama sehingga dalam memperebutkan kekuasaan akan menghadapi dua kondisi, yakni konflik dan consensus. Di satu sisi akan menghadapi perbedaan, persaingan dan pertentangan pendapat, disisi lain juga memungkinkan terjadinya kekerasan atau



konsensus. Oleh karena itulah konflik merupakan gejala serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat dan tidak akan dapat dilenyapkan melainkan diatur agar tidak mengakibatkan perpecahan.

Menurut Watkins, konflik terjadi karena terdapat dua pihak yang bertikai dan keduanya yang potensial dapat saling menghambat. (Robby I Chandra ; 1992). Fisher menyatakan konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan. Penyebab konflik pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Ini akan diuraikan lebih lanjut:

1. Kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan horizontal ini sering menimbulkan konflik, karena masing-masing kelompok masyarakat tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dan bahkan saling bertentangan.
2. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan.

Konflik merupakan suatu situasi dimana aktor-aktor yang saling berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan kepentingan dan masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya. Namun jebakan kekuasaan menimbulkan ketidakadilan yang pada gilirannya menjadi sumber kekerasan, baik atas nama keadilan maupun ketidakadilan. Konflik dengan

menggunakan kekerasan terjadi dalam suatu masyarakat karena adanya “perasaan” dirampas yang menimbulkan ketidak puasan.

Konflik juga dapat dikatakan sebagai pertentangan oleh karena terjadi perbedaan antara dua atau lebih baik individu maupun kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dan berusaha menjadi dominan atas pihak lain. Ted Robert Gur dalam Maswadi Rauf menyebutkan ada empat prasyarat yang harus terpenuhi agar sebuah hubungan sosial dapat dikatakan sedang mengalami konflik, ia mencirikan sebagai berikut: ( Maswadi Rauf ; 2000)

- a. *Ada dua pihak yang terlibat*, Pihak menang dan pihak yang kalah artinya pihak menang adalah pihak yang berhasil memenangkan pilkada dan meraih suara terbanyak serta diakui dan disahkan oleh undang-undang
- b. *Mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi*. Calon yang tidak berhasil memperoleh suara terbanyak adalah calon yang besar kemungkinannya membuat tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Tim sukses dari calon yang gagal biasanya membuat tindakan atau tidak merasa puas dengan hasil perhitungan suara yang diperoleh calonnya..
- c. *Mereka menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan menghancurkan, melukai, menghalang-halangi lawannya*. Pendukung calon yang gagal biasanya membuat tindakan kekerasan baik di Kantor KPU maupun di lokasi-lokasi lainnya. Sedangkan calon yang menang tidak memberikan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.
- d. *Interaksi yang bertentangan itu bersifat terbuka sehingga bisa dengan mudah*

*dideteksi oleh pengamat independen.*

Konflik merupakan gejala sosial yang seringkali muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat beberapa bentuk konflik dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk konflik yang diilhami dari pandangan para ahli sosiologi.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konflik organisasi adalah konflik yang terjadi dalam tubuh organisasi KPU yang disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dan perbedaan nilai diantara dua orang atau lebih dalam hubungan internal kelembagaan KPU Kabupaten Takalar.

#### **b. Jenis Konflik**

Konflik dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah orang yang terlibat konflik, yaitu (Wirawan, 2010:55):

##### **1. Konflik Personal**

Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang individu karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan yang ada atau karena mempunyai kepribadian ganda.

##### **2. Konflik Interpersonal**

Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi atau konflik di tempat kerja. Konflik yang terjadi di antara mereka yang bekerja untuk suatu organisasi baik organisasi profit atau nonprofit. Konflik interpersonal

adalah konflik pada suatu organisasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik dan saling tergantung dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Konflik interpersonal dapat terjadi dalam tujuh macam bentuk yaitu:

- 1) Konflik antar manajer
- 2) Konflik antar pegawai dan manajer
- 3) Konflik hubungan industrial
- 4) Konflik antar kelompok kerja
- 5) Konflik interes/konflik kepentingan
- 6) Konflik antara organisasi dan pihak luar organisasi

Wirawan (2010:59) juga mengelompokkan konflik berdasarkan sifatnya menjadi konflik konstruktif dan konflik destruktif:

### 3. Konflik Konstruktif (Konflik Produktif)

Konflik konstruktif adalah konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik jenis ini membangun sesuatu yang baru atau mempererat hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik ataupun mereka memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari konflik. Interaksi pihak-pihak yang terlibat konflik merupakan interaksi membangun dan makin mendekatkan jarak interaksi sosial di antara mereka dan membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencapai objektif mereka. Di samping itu, konflik

jenis ini memungkinkan interaksi konflik yang keras kembali normal dan sehat. Akhir dari konflik konstruktif antara lain win-win solution, solusi kolaborasi atau kompromi, serta meningkatkan perkembangan dan kesehatan organisasi.

#### 4. Konflik Destruktif (Konflik Kontraproduktif)

Konflik destruktif adalah konflik dimana pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku karena tujuan konflik didefinisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu konflik yang sesungguhnya. Pihak-pihak yang terlibat konflik menggunakan teknik manajemen konflik kompetisi, ancaman, konfrontasi, kekuatan, agresi dan sedikit sekali menggunakan negosiasi untuk menciptakan win-win solution.

Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antarkelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional.

- 1) Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antarpribadi dalam menyikapi suatu hal. Misalnya individu yang terlibat utang, atau masalah pembagian warisan dalam keluarga.
- 2) Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antarpartai politik karena perbedaan ideologi,



asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya bentrokan antarpartai politik pada saat kampanye.

- 3) Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras (rasialisme) di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
- 4) Konflik antarkelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah.

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
- 2) Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- 3) Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
- 4) Konflik antara satuan nasional, seperti antarpartai politik, antarnegara, atau organisasi internasional.



T. Hani Handoko (1984) dalam Lumintang (2015:3) mengatakan bahwa dalam kehidupan organisasi, konflik juga dapat dibedakan menurut pihak-pihak yang saling bertentangan. Atas dasar hal ini, dikenal lima jenis konflik:.

Konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seorang individu :

- 1) menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari pada kemampuannya.
- 2) Konflik antar individu dalam organisasi yang sama, dimana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan (seperti antara manajer dan bawahan).
- 3) Konflik antara individu dan kelompok, yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok.
- 4) Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok.
- 5) Konflik antar organisasi, yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien.

Berdasarkan konsep mengenai jenis konflik dapat disimpulkan bahwa konflik internal antara komisioner dan sekretariat KPU termasuk kedalam konflik antar individu dalam organisasi yang sama yang bersifat konstruktif (produktif) karena dapat membawa perubahan positif pada lingkup organisasi.

#### 5. Konflik Kepentingan

Jenis konflik yang mempunyai ciri konflik individual dan konflik interpersonal adalah konflik kepentingan atau konflik interes (conflict of interest). Konflik ini berkaitan dengan konflik dalam diri seorang individu dalam suatu altar sistem sosial (organisasi atau perusahaan) yang membawa implikasi bagi individu dan sistem sosialnya. Konflik interes adalah suatu situasi konflik di mana seorang individu pejabat atau aktor sistem sosial mempunyai interes personal lebih besar daripada interes organisasinya sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajibannya sebagai pejabat sistem sosial dalam melaksanakan kepentingan (tujuan) sistem sosial. Konflik interes banyak terjadi dalam pengadaan barang, jasa dan tender-tender proyek, baik di lembaga pemerintah maupun di lembaga bisnis (Wirawan, 2010 :58).

##### **c. Penyebab Konflik**

Sebuah masalah yang timbul tentunya ada penyebab mengapa masalah itu terjadi, begitu juga dengan konflik. Konflik muncul sebagai akibat adanya perbedaan dan benturan kepentingan yang saling berhadapan. Simon Fisher, dkk,

(2000) dalam Gatara dan Said (2007:183) menjelaskan tentang berbagai teori penyebab terjadinya konflik yaitu:

### 1. Teori Hubungan Masyarakat

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan adanya polarisasi yang terus terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah :

- a) meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik.
- b) mengusahakan toleransi agar masyarakat bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

### 2. Teori Negosiasi Prinsip

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan adanya posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang hendak dicapai dalam teori negosiasi prinsip ini adalah:

- a) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan mendorong pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkonflik untuk melakukan negosiasi yang dilandasi kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.

- b) Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak atau semua pihak (win-win solution for all).

### 3. Teori Kebutuhan Manusia

Teori ini berasumsi bahwa konflik yang terjadi bisa disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau sengaja dihambat oleh pihak lain. Kebutuhan dasar manusia biasanya menyangkut tiga hal, yakni kebutuhan fisik, mental dan sosial. Sasaran yang dicapai teori ini adalah:

- a) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan secara bersama-sama mengenai kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, sehingga memperoleh pilihan-pilihan (alternatif-alternatif) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
- b) Membantu agar pihak-pihak yang mengalami konflik dapat meraih kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak. Menurut Maslow dalam Lianto (2010, 27-31) kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi:

#### 1) Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, seks, tidur, istirahat, dan udara. Tak diragukan lagi

bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak. Ini berarti bahwa pada diri manusia yang sangat merasa kekurangan segala-galanya dalam kehidupannya, besar sekali kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis dan bukan yang lainnya.

## 2) Kebutuhan Rasa Aman

Setelah kebutuhan dasar terpuaskan, muncullah kebutuhan akan rasa aman atau keselamatan. Kebutuhan ini menampilkan diri dalam kategori kebutuhan akan kemantapan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan ketakutan, kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, dan sebagainya. Jika hal-hal itu tidak ditemukan, maka ia akan menjadi cemas dan merasa tidak aman. Orang yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras untuk menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak diharapkan.

## 3) Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial yang mencakup kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, saling percaya, cinta, dan kasih sayang akan menjadi motivator penting bagi perilaku. Ia membutuhkan terutama tempat (peranan) di tengah kelompok atau lingkungannya, dan akan berusaha keras untuk mencapai dan mempertahankannya.



#### 4) Kebutuhan Penghargaan

Maslow membedakan kebutuhan penghargaan menjadi kebutuhan akan penghargaan secara internal dan eksternal. Penghargaan secara internal mencakup kebutuhan akan harga diri, kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan, dan kebebasan atau kemerdekaan. Penghargaan secara eksternal menyangkut penghargaan dari orang lain, pengakuan, ketenaran, martabat, perhatian, kedudukan, apresiasi atau nama baik.

#### 5) Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri

Setiap orang harus berkembang sepenuh kemampuannya. Kebutuhan manusia untuk bertumbuh, berkembang, dan menggunakan kemampuannya disebut sebagai aktualisasi diri, yaitu sebagai hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh kemampuan sendiri, menjadi apa menurut kemampuan yang dimiliki.

#### 4. Teori Identitas

Teori ini berasumsi bahwa konflik terjadi akibat adanya identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang hendak dicapai dalam teori ini adalah :

- a) melalui fasilitas komunikasi dan dilalog antara pihak yang mengalami konflik diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berkonflik.



- b) meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

#### 5. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan adanya ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi di berbagai budaya yang berbeda.

Sasaran yang hendak dicapai dalam teori ini adalah :

- a) menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang mengalami konflik.
- b) mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak atau kelompok lain.
- c) meningkatkan keefektifan komunikasi antara budaya.

#### 6. Teori Transformasi Konflik

Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai dalam teori ini adalah :

- a) mengubah beberapa struktur yang dapat menimbulkan terjadinya ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kesenjangan ekonomi.
- b) meningkatkan ikatan hubungan dan sikap jangka panjang antarpihak atau antar kelompok yang mengalami konflik.
- c) mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, rekonsiliasi, dan legitimasi atau pengakuan.

Selanjutnya Handoko (1984) dalam Pasolong (2008:174) menyimpulkan bahwa sumber-sumber konflik dalam suatu organisasi adalah :

1. Manusia dan perilakunya

Manusia dan perilakunya dikatakan sebagai salah satu sumber konflik sebab manusia dengan latar belakang pendidikan, sifat-sifat pribadi, berbagai naluri (instinct), baik secara perseorangan maupun kelompok, tidak dapat melepaskan diri dari berbagai gejala kepentingan seperti:

- a) berbagai atribut yang bertalian dengan pangkat dan kedudukan
  - b) sistem nilai yang tidak sama di antara sesama bawahan maupun antar atasan dengan bawahan
  - c) adanya bermacam-macam harapan (expectations)
  - d) gaya kepemimpinan
  - e) berbagai sifat atau kepribadian
  - f) semangat dan ambisi
2. Struktur organisasi

Struktur organisasi dikatakan sebagai salah satu sumber konflik apabila di dalam kehidupan organisasi terjadi ketidaksesuaian yang menyangkut:

- a. Tugas pokok dan fungsi
- b. Hubungan dan tata kerja, arus pelaksanaan kerja
- c. Perencanaan dan pelaksanaannya
- d. Kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab
- e. Sistem reward and punishment

f. Sistem karir dan prestasi kerja

3. Komunikasi

Komunikasi dikatakan sebagai sumber konflik karena:

- a. Perintah yang tidak jelas
- b. Berbagai hambatan sarana komunikasi
- c. Lingkungan komunikasi yang tidak mendukung
- d. Sistem komunikasi

Nitisemito dalam Pasolong (2008:174) merumuskan sebab-sebab timbulnya konflik antara lain :

1. Sebab internal organisasi, antara lain:
  - a. perbedaan pendapat
  - b. salah paham
  - c. salah satu atau kedua pihak merasa dirugikan
  - d. perasaan yang selalu sensitif
2. Sebab eksternal organisasi, adanya adu domba oleh pihak lain secara sengaja maupun tidak.

4. Struktur Konflik

Situasi konflik ada dua jenis, pertama konflik menang-kalah (zero-sum-conflict) dan konflik menang-menang (non-zero-sum-conflict). Konflik menang kalah adalah konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak mungkin tercapainya suatu kompromi antara masing-masing pihak yang berkonflik. Ciri-ciri dari konflik ini adalah tidak mengadakan kerjasama dan hasil kompetisi akan

dinikmati oleh pemenang saja. Konflik menang-menang adalah suatu konflik dimana pihak-pihak yang terlibat masih mungkin mengadakan kompromi dan kerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut.

## 5. Pengaruh Konflik

Konflik mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan umat manusia, baik secara individual maupun kelompok. Konflik mempunyai pengaruh positif dan negatif. Kedua pengaruh tersebut menciptakan perubahan bagi kehidupan manusia. Konflik mengubah dan mengembangkan kehidupan manusia menjadi lebih baik (Wirawan, 2010:106).

### d. Resolusi Konflik

Resolusi Konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Resolusi konflik pada umumnya menangani akar persoalan dan berusaha membangun hubungan baru yang lebih permanen diantara para pihak. Pendekatan ini bukan hanya untuk penyelesaian konflik, melainkan juga mencapai resolusi dan berbagai akar persoalan. ( Mahi M. Hikmat;2010:99)

Menurut Wirawan (2010:177) resolusi konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk

menghasilkan keluaran konflik. Metode resolusi konflik bisa dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (self regulation) atau melalui intervensi pihak ketiga (third party intervention). Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Intervensi pihak ketiga terdiri atas : (1) resolusi melalui pengadilan, (2) proses administratif dan (3) resolusi perselisihan alternatif (alternative dispute resolution) yang terdiri dari mediasi dan arbitrase.

Manajemen konflik adalah proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Beberapa tujuan manajemen konflik yaitu (Wirawan, 2010 : 129-132) :

1. Mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan organisasi
2. Memahami orang lain dan menghormati keberagaman
3. Meningkatkan kreatifitas
4. Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang
5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman dan kerja sama
6. Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik

Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilman (1974) dalam Wirawan (2010:140) mengembangkan taksonomi gaya manajemen konflik berdasarkan dua dimensi, yaitu kerja sama dan keasertifan. Kerja sama adalah upaya orang untuk



memuaskan orang lain jika menghadapi konflik sedangkan keasertifan adalah upaya orang untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik.

Lima jenis gaya manajemen konflik yang dikemukakan Thomas dan Kilmann dalam Wirawan (2010:140) yaitu :

#### 1. Kompetisi (*competing*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan tinggi dan tingkat kerja sama rendah. Gaya ini merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik dengan biaya lawannya. Dalam organisasi dengan birokrasi yang tinggi, bawahan hanya boleh memberi masukan kepada atasan, bukan mendebat. Oleh karena itu, jika terlibat konflik dengan bawahannya, atasan akan menggunakan gaya manajemen kompetisi.

#### 2. Kolaborasi (*collaborating*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerja sama yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif, dasar bersama, dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Gaya manajemen konflik kolaborasi merupakan upaya bernegosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik. Upaya tersebut sering meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan. Selain itu, kreativitas dan inovasi juga digunakan untuk mencari alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.



### 3. Kompromi (*compromising*)

Gaya manajemen konflik tengah atau menengah, di mana tingkat keasertifan dan kerjasama sedang. Dengan menggunakan strategi memberi dan mengambil (*give and take*), kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka.

### 4. Menghindar (*avoiding*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerja sama yang rendah. Dalam gaya manajemen konflik ini, kedua belah pihak yang terlibat konflik berusaha menghindari konflik. Bentuk menghindar tersebut dapat berupa :

- a. menjauhkan diri dari pokok masalah
- b. menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat
- c. menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan.

### 5. Mengakomodasi (*accomodating*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan rendah dan tingkat kerja sama tinggi. Seseorang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya. Agar dapat sukses dalam menggunakan gaya manajemen konflik, pihak yang terlibat konflik memerlukan keterampilan tertentu (Wirawan, 2010:142).

## 2. Penyelesaian Konflik

### a. Arbitrase

Konflik merupakan sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa apabila para pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya. Baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pada pihak lain. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak terselesaikan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses *Ajudikasi* ataupun *Alternative Disputes Resolution* (ADR). *Ajudikasi* merupakan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, sedangkan *Alternative Disputes Resolution* (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Kata Arbitrase berasal dari *Arbitrase* (Latin), *Arbitrage* (Belanda), *Arbitration* (Inggris), *Schiedspruch* (Jerman) dan *Arbitrage* (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa, atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadi sengketa. Para pemutus atau arbiternya dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang

terjadi di antara mereka. Pemilihan arbiter biasanya di dasarkan pada kemampuan dan keahliannya dalam bidang tertentu dan bertindak secara netral.

Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase dalam perkembangan akhir-akhir ini sudah banyak dilakukan oleh oara pihak yang bersengketa. Selain karena prosesnya cepat, kalangan *professional* memilihnya karena bersifat sangat dijaga. Putusannya, yang *final and binding*.

H. Priyatna Abdurrasyid mengatakan arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Butir 1 menyebutkan bahwa denifisi arbitrase adalah: “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Dari denifisi-denifisi tersebut dapat dilihat bahwa faktor penting dari arbitrase adalah adanya kesepakatan para pihak untuk:

1. Menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga (di luar pengadilan umum,
2. Menugaskan pihak ketiga tersebut untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan,
3. Menerima putusan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

## **b. Adjudikasi**

Adjudication merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang baru berkembang di beberapa negara. Sistem ini sudah mulai populer di Amerika dan Hongkong.

Secara harafiah, pengertian “ajuddication” adalah putusan. Dan memang demikian halnya. Para pihak yang bersengketa sepakat meminta kepada seseorang untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul diantaramereka:

1. Orang yang diminta bertindak dalam adjudication disebut adjudicator
2. Dan dia berperan dan berfungsi seolah-olah sebagai HAIM (act as judge),
3. Oleh karena itu, dia diberi hak mengambil putusan (give decision).

Pada prinsipnya, sengketa yang diselesaikan melalui sistem adjudication adalah sengketa yang sangat khusus dan kompleks (complicated). Tidak sembarangan orang dapat menyelesaikan, karena untuk itu diperlukan keahlian yang khusus oleh seorang spesialis profesional. Sengketa konstruksi misalnya. Tidak semua orang dapat menyelesaikan. Diperlukan seorang insinyur profesional. Di Hongkong misalnya. Sengketa mengenai pembangunan lapangan terbang ditempuh melalui lembaga adjudication oleh seorang adjudicator yang benar-benar ahli mengenai kontruksi lapangan terbang.

Proses penyelesaian sengketa dalam sistem ini, sangat sederhana. Apabila timbul sengketa :

1. Para pihak membuat kesepakatan penyelesaian melalui adjudication,

2. Berdasar persetujuan ini, mereka menunjuk seorang adjudicator yang benar-benar profesional,
3. Dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak diberi kewenangan ( authority ) kepada adjudicator untuk mengambil keputusan ( decision ) yang mengikat kepada kedua belah pihak ( binding to each party )
4. Sebelum mengambil keputusan, adjudicator dapat meminta informasi dari kedua belah pihak baik secara terpisah maupun secara bersama-sama.

#### **B. Kerangka Pikir**

Sebagaimana dalam UUD 1945, Pasal 18 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pilkada serentak 2017 diwarnai oleh konflik eksternal antara KPU dan Bupati Takalar mengenai penetapan jadwal penyelenggaraan pilkada. konflik eksternal yang telah terjadi secara tidak langsung mempengaruhi loyalitas para pegawai sehingga timbul konflik. Beberapa teori penyebab konflik menurut Fisher, dkk, dalam Fisher, dkk, (2000) dalam Gatara dan Said (2007: 183) yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori kesalahpahaman antar budaya dan teori transformasi konflik.

Ketika terjadi konflik kepentingan/interes KPU diperlukan manajemen/tata kelola penyelesaian konflik yang efektif dalam mengatasi konflik. Beberapa gaya manajemen konflik menurut Thomas dan Killman yaitu: kompetisi (competing),



kolaborasi (*collaborating*), kompromi (*compromising*), menghindar (*avoiding*), mengakomodasi (*accomodating*). Sedangkan pilihan dalam menyelesaikan konflik berdasarkan teori resolusi konflik dapat berupa mengatur sendiri (*self regulation*) atau intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan kerangka pikir dibawah ini:

#### BAGIAN KERANGKA PIKIR



#### C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai Tata Kelola Konflik dalam Pilkada Serentak Kabupaten Takalar 2017.

#### D. Deskripsi Fokus Penelitian

Tata Kelola Konflik dalam Pilkada Serentak Kabupaten Takalar 2017.

##### 1. Kompetisi (*Competing*)



Kompetisi ini merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, dimana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik dengan lawannya dalam pilkada serentak di Kabupaten Takalar. Kompetisi terbagi jadi 2 yaitu, (a) Kompetisi Internal (b) Kompetisi Eksternal

#### 2. Kolaborasi (*Collaborating*)

Kolaborasi ini merupakan upaya bernegosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik di pilkada serentak di Kabupaten Takalar.

#### 3. Kompromi (*Compromising*)

Kompromi merupakan suatu strategi penyelesaian konflik pilkada serentak di Kabupaten Takalar dimana semua yang terlibat saling menyadari dan sepakat pada keinginan bersama.

#### 4. Menghindar

Tingkat keasertifan dan kerja sama yang rendah, semua yang terlibat dalam konflik menyadari tentang masalah yang dihadapi sehingga kedua belah pihak yang terlibat konflik di pilkada serentak di Kabupaten Takalar berusaha menghindari konflik. Bentuk menghindar tersebut berupa : (a) menjauhkan diri dari pokok masalah (b) menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat (c) menarik diri dari konflik

#### 5. Mengakomodasi

Akomodasi merupakan permasalahan yang mengabaikan dirinya sendiri, dan memberi kesempatan orang lain untuk menang. Dalam pilkada serentak di

Kabupaten Takalar agar dapat sukses pihak yang terlibat konflik memerlukan keterampilan tertentu.

Faktor penyebab konflik pilkada serentak kabupaten takalar tahun 2017.

#### 7. Hubungan Masyarakat

Adanya polarisasi yang terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dalam pilkada serentak kabupaten Takalar.

#### 8. Negosiasi Prinsip

Adanya posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik di pilkada serentak di Kabupaten Takalar.

#### 9. Kebutuhan Manusia

Adanya kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi atau sengaja dihambat oleh pihak lain dalam pilkada serentak di Kabupaten Takalar. Kebutuhan manusia mencakup 3 hal yaitu : (a) Kebutuhan fisik, (b) Mental, (c) Sosial.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan selama 2 (dua bulan). Adapun lokasi penelitian di Kabupaten Takalar dengan obyek penelitian di Kantor KPU.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Kualitatif, dimana penelitian ini yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian misalnya : perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah Studi Kasus yang merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini berupa data interview dengan informan pada KPU Kabupaten Takalar. Dalam penelitian kualitatif, hal

yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Sumber data pada tahap awal adalah informan yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti sehingga mampu membuka pintu bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Sanafiah Faisal (1990) mengemukakan bahwa situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi muara dari banyak domain lainnya. Sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kriteria antara lain (Sugiyono, 2015:293):

- a. mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturisasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
- b. mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti.

Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam objek yang diteliti dan paling mengetahui tentang situasi konflik internal komisioner dan sekretariat KPU pada pilkada Kabupaten Takalar 2017 yaitu para komisioner KPU Kabupaten Takalar dan staf sekretariat KPU Kabupaten Takalar yang bekerja di KPU Kabupaten Takalar pada tahun 2017 (data terlampir).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data sebagai pendukung data primer yang diperoleh dari buku, jurnal dan situs internet yang terkait penelitian yang dapat berupa bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian.

### D. Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seseorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya.

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan dan pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini

- Anzar Hasanuddin ( Staff Sekretariat KPU Kab Takalar )
- Muh Arfah ( Komisioner KPU Kab Takalar )
- Arifin, S.Sos ( Sekretaris Panwas Kab. Takalar )
- Ahmad Leta ( Anggota Bawaslu Kab. Takalar )
- Daeng Nompo ( Timses Paslon 1 )
- Satria Dabar ( Timses Paslon 2 )

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan, penulis menggunakan pengumpulan data dengan teknik:

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap tata kelola konflik dalam pilkada Kabupaten Takalar 2017.

### 2. Wawancara.

Penelitian ini meneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mengenai bagaimana tata kelola konflik dalam pilkada Kabupaten Takalar 2017.

### 3. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumentar adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian data dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumentar ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian.



## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban informan yang diwawancarai oleh peneliti terasa belum memuaskan setelah dianalisa, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu :

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam hal ini peneliti merangkum hasil wawancara dari semua informan dan mencari informasi yang terkait dengan fokus penelitian sehingga dapat ditemukan informasi yang sama.

### 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif serta menggunakan bagan dan tabel dalam penyajian data.

### *3. Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini kesimpulan yang diambil adalah berdasarkan dari data yang disajikan berdasarkan tahapan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengambilan data.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) sehingga disebut juga metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2015:8).

### G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2015:270-277) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (validitas internal), Transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektivitas):

#### 1. Pengujian *Kredibilitas*

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck.

#### 2. Pengujian *Transferability*

Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian ini, sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian ini di tempat lain maka peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Pengujian *Dependability* Pengujian dependability disebut reliabilitas. Penelitian ini dapat dikatakan reliabel apabila orang lain dapat

mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Peneliti harus mempunyai dan menunjukkan “jejak aktifitas lapangannya”, mulai dari penentuan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data sampai penarikan kesimpulan.

#### 4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* disebut uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan beberapa hal yang dianggap relevan dengan proses penelitian tentang lokasi penelitian yang diteliti. Semua aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut. Gambaran umum lokasi penelitian diharapkan mampu menjelaskan serta memberikan gambaran tentang objek penelitian.

#### **A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Takalar**

Pada pembahasan mengenai gambaran umum Kabupaten Takalar nantinya akan memberi pemahaman mengenai Kabupaten Takalar yang ditinjau dari Sejarah Kabupaten Takalar, Keadaan Geografis, Keadaan Demografis, serta Pemerintahan Kabupaten Takalar.

##### **a. Sejarah Kabupaten Takalar**

Kabupaten Takalar yang terbentuk pada tanggal 10 Februari 1960, proses pembentukannya melalui tahapan perjuangan yang panjang. Sebelumnya, Takalar sebagai Onder afdeling yang tergabung dalam daerah Swatantra Makassar bersama-sama dengan Onder afdeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan dan Jeneponto. Onder afdeling Takalar, membawahi beberapa distrik yaitu: Distrik Polombangkeng, Distrik Galesong, Distrik Topejawa, Distrik Takalar, Distrik Laikang, Distrik Sanrobone. Setiap Distrik diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali Distrik Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo'mo.



Upaya memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Takalar, dilakukan bersama antara Pemerintah, Politisi dan Tokoh-tokoh masyarakat Takalar. Melalui kesepakatan antara ketiga komponen ini, disepakati dua pendekatan/cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Takalar, yaitu: Melalui Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Swatantra Makassar. Perjuangan melalui Legislatif ini, dipercayakan sepenuhnya kepada empat orang anggota DPRD utusan Takalar, masing-masing H. Dewakang Dg. Tiro, Daradda Dg. Ngambe, Abu Dg. Mattola dan Abd. Mannan Dg. Liwang.

Melalui pengiriman delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyampaikan aspirasi, agar harapan terbentuknya Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap Gubernur Sulawesi adalah Bapak H. Makkarang Dg. Manjarungi, Bostan Dg. Mamajja, H. Mappa Dg. Temba, H. Achmad Dahlan Dg. Sibali, Nurung Dg. Tombong, Sirajuddin Dg. Bundu dan beberapa lagi tokoh masyarakat lainnya.

Upaya ini dilakukan tidak hanya sekali jalan. Titik terang sebagai tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan tersebut sudah mulai nampak, namun belum mencapai hasil yang maksimal yaitu dengan keluarnya Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 1957 (LN No. 2 Tahun 1957) maka terbentuklah Kabupaten Jeneponto-Takalar dengan Ibukotanya Jeneponto. Sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama adalah Bapak H. Mannyingarri Dg. Sarrang dan Bapak Abd. Mannan Dg. Liwang sebagai ketua DPRD.

Para politisi dan tokoh masyarakat tetap berjuang, berupaya dengan sekuat tenaga, agar Kabupaten Jeneponto-Takalar segera dijadikan menjadi dua Kabupaten masing-masing berdiri sendiri yaitu: Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar. Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Takalar, berhasil mencapai puncaknya, setelah keluarnya Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959), tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Takalar termasuk didalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak tanggal 10 Februari 1960 terbentuklah Kabupaten Takalar, dengan Bupati Kepala Daerah (Pertama) adalah Bapak H. Donggeng Dg. Ngasa seorang Pamongpraja Senior. Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang sebagai ibukota Kabupaten Takalar.

Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomer 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 Februari 1960 sebagai hari jadi Kabupaten Takalar. Berdasarkan struktur pemerintahan pada waktu itu, Bupati Kepala Daerah, dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dibantu oleh empat orang Badan Pemerintahan Harian (BPH), dengan personalianya yaitu:

- BPH Tehnik & Keamanan : H. Mappa Dg. Temba
- BPH Keuangan : Bangsawan Dg. Lira
- BPH Pemerintahan : H. Makkarang Dg. Manjarungi
- BPH Ekonomi : Bostan Dg. Mamajja

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Distrik Polombangkeng dijadikan dua Kecamatan yaitu Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, Distrik Galesong dijadikan dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, Distrik Topejawa, Distrik Takalar, Distrik Laikang dan Distrik Sanrobone menjadi Kecamatan Totallasa (Singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (Kecamatan Ibukota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara). Sehingga dengan demikian sampai sekarang Kabupaten Takalar terdiri dari sembilan buah kecamatan, sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Kesembilan kecamatan ini membawahi sejumlah 100 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar + 286.906 jiwa.

#### **b. Keadaan Geografis Kabupaten Takalar**

Kabupaten Takalar berada antara 5.3 - 5.33 derajat Lintang Selatan dan antara 119.22-118.39 derajat Bujur Timur.<sup>58</sup> Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattallassang terletak 29 km arah selatan dari Kota Makassar ibukota Provinsi

Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar 566,51 km<sup>2</sup>, dimana 240,88 km<sup>2</sup> diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km.

Jumlah penduduk sekitar  $\pm$  286.906 dengan batas wilayah Kabupaten Takalar sebagai berikut: bagian Utara Kabupaten Takalar berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, bagian Selatan dibatasi oleh Laut Flores, bagian Barat dibatasi oleh Selat Makassar.

Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan masing-masing:

1. Kecamatan Manggarabombang
2. Kecamatan Mappakasunggu
3. Kecamatan Polombangkeng Selatan
4. Kecamatan Polombangkeng Utara
5. Kecamatan Galesong Selatan
6. Kecamatan Galesong Utara
7. Kecamatan Pattallassang
8. Kecamatan Galesong
9. Kecamatan Sanrobone

Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, daratan dan perbukitan. Bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan kemiringan antara 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 derajat, dengan batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi pantai, batu gemping, serta beberapa tempat batuan lelehan basal. Berdasarkan data dari Perkebunan Nusantara IV, rata-rata curah hujan terbanyak tahun 2015 terjadi pada Bulan Januari yaitu sekitar 1.321 mm dan banyaknya rata-rata hari hujan yang

terjadi pada tahun 2015 terbanyak terjadi pada bulan Januari, yaitu sebanyak 28 hari.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Takalar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Kabupaten Takalar bagian Timur (meliputi wilayah Palomangkeng Utara dan Palomangkeng Selatan) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah bukit-bukit (Gunung Bawakaraeng). Wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perkebunan.
- b. Kabupaten Takalar bagian Tengah (wilayah Pattalassang; ibukota Takalar) merupakan dataran rendah dengan tanah relatif subur sehingga di wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, perkebunan dan pertambakan.
- c. Kabupaten Takalar bagian Barat (meliputi Mangarabombang, Galesong Utara, Galesong Selatan, Galesong Kota, Mappakasunggu dan Sanrobone) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur untuk pertanian dan perkebunan, sebagian merupakan daerah pesisir pantai yang cocok untuk pertambakan dan perikanan laut. Potensi ikan terbang, telur ikan terbang, dan rumput laut di wilayah ini diduga cukup potensial untuk dikembangkan.

Potensi sumber daya alam Kabupaten Takalar meliputi perikanan laut, pertanian, perkebunan dan peternakan. Luas areal budidaya ikan pada tahun 2006 sekitar 4.856 ha, budidaya tambak dengan luas 4.343 ha yang tersebar di hampir setiap



kecamatan Produksi ikan laut di Kabupaten Takalar pada tahun 2006 mencapai 26.776 ton. Selain itu Kabupaten Takalar dikenal sebagai penghasil ikan terbang dan rumput laut.

Dalam Program Gerbang Emas Kabupaten Takalar sangat potensial dijadikan sebagai pusat inkubator pengembangan rumput laut. Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota Makassar, dimana Kota Makassar adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Bidang wilayah penyanggah bagi Kabupaten Takalar dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Takalar dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri Kota Makassar. Yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis.

Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan sederhana maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional, nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal, dengan fasilitas pelabuhan yang ada, Takalar memiliki potensi akses regional maupun nasional sebagai pintu masuk baru untuk kegiatan industri dan perdagangan untuk kawasan Indonesia Timur setelah Makassar mengalami kejenuhan. Demikian pula dengan dukungan sarana dan prasarana transportasi darat, seperti; akses jalan menuju kota Makassar, jarak yang relatif tidak jauh dari pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, jalan beraspal dan sarana transportasi laut yang memadai berupa pelabuhan atau dermaga.

### c. Keadaan Demografis Kabupaten Takalar

Pada tahun 2015, penduduk Kabupaten Takalar berjumlah 286.906 jiwa. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Takalar mengalami perlambatan dari 1,22 persen di tahun 2013 menjadi 1,13 persen di tahun 2014, dan kemudian menjadi 1,11 persen di tahun 2015 dengan *sex ratio* sebesar 92,6 persen, yang berarti bahwa ada 92 laki-laki dalam 100 perempuan.

Kepadatan penduduk Kabupaten Takalar dalam kurun waktu 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan dari 500 jiwa di tahun 2014 menjadi 506 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2015. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Galesong Utara, yakni sekitar 2.562 penduduk per kilometer persegi, diikuti Galesong dengan 1.543 penduduk per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan 229 penduduk per kilometer persegi.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan terbanyak berada pada kelompok usia muda yakni kelompok umur 0-4 tahun diikuti kelompok umur 15-19 tahun. Dan jika dilihat, penduduk usia produktif dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan, yaitu dari 65,86 persen menjadi 66,06 persen.

Ada sebanyak 4,83 persen angkatan kerja di Takalar yang tidak/belum pernah sekolah, 22,42 yang tidak/belum tamat SD, dan 25,94 persen yang tamat SD. Jika dilihat dari lapangan pekerjaan utama, hamper separuh pekerja di Takalar bekerja di sector pertanian. Industri pengolahan menyerap tenaga kerja lebih dari

dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, sebaliknya tenaga kerja disektor jasa kemasyarakatan mengalami pengurangan jumlah yang sangat signifikan hingga lebih dari separuh jumlah tahun 2014.

Tingginya persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian disebabkan karena secara geografis Takalar merupakan wilayah sentra pertanian. Hal lainnya juga dikarenakan pendidikan angkatan kerja yang relatif rendah, sehingga akan mengalami kendala dalam pelaksanaan pekerjaan di sektor lainnya karena kurangnya skill/keterampilan yang dimiliki.

#### **d. Pemerintahan Kabupaten Takalar**

Pada tahun 2015, total anggaran pendapatan daerah Kabupaten Takalar sekitar Rp. 1,014 triliun, yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan daerah mengalami peningkatan hampir 20 persen dari tahun sebelumnya. Dana perimbangan meningkat sebesar 15,85 persen dan pendapatan lainnya meningkat sebesar 36,16 persen. Anggaran pendapatan terbesar diperoleh dari dana perimbangan yang berasal dari dana alokasi umum dan khusus yang pada tahun 2015 mencapai sekitar 73,43 persen dari total pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah sendiri persentasenya hanya berkisar 7,38 persen dan pendapatan lain yang sah berkisar 19,19 persen. Total belanja daerah sekitar Rp. 964,27 miliar, yang berasal dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada tahun 2015 belanja tidak langsung mencapai sekitar 51,90 persen, sedangkan belanja langsung mencapai sekitar 48,10 persen. Anggaran daerah yang paling banyak digunakan adalah

belanja pegawai sekitar 55 persen, kemudian belanja barang/jasa dan modal sekitar 41 persen.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Takalar pada tahun 2015, sebanyak 2.476 orang, terdiri dari pegawai daerah 3.018 orang dan pegawai pusat sekitar 542 orang. Dari 2.476 orang total Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah, sekitar 63,77 persen.

## **B. Gambaran Konflik dan cara Tata Kelola Konflik**

### **1. Faktor Penyebab Konflik**

Pemilihan kepala daerah secara serentak berlangsung di 101 provinsi/kota/kabupaten seluruh Indonesia, termasuk di antaranya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, riuhnya pilkada tentang berbagai macam konflik juga terjadi di Pilkada tahun 2017. Seperti yang telah dirangkum oleh [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id) mengenai Indeks Kerawanan Pemilu Kepala Daerah menjelaskan bahwa khusus daerah di Sulawesi Selatan disimpulkan bahwa indeks kerawanan konflik cenderung rendah, namun ada beberapa daerah yang memperoleh angka IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) hampir masuk dalam kategori kerawanan tinggi, yakni 2,78, diantaranya daerah seperti Kab. Palopo dan Kab. Sidrap yang diterangkan dalam gambar tabel berikut :

Tabel. 4.1. Tabel Indeks Kerawanan Pemilukada, bawaslu.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Palopo	Kota Parepare	Kota Makassar	Kab. Bone	Kab. Sinjai	Kab. Bantaeng	Kab. Enrekang	Kab. Sidreng Rappang	Kab. Jeneponto	Kab. Majene	Kab. Luwu	Kab. Pinrang
INDEKS	2,53	2,16	1,37	1,35	1,25	1,39	1,53	1,64	1,59	1,85	1,44	1,77
Dimensi PENYELENGGARAAN	2,78	2,56	1,40	2,16	1,71	1,60	1,49	1,58	1,80	1,13	2,27	1,71
Dimensi KONTESTASI	2,67	2,38	1,33	1,00	1,17	1,37	1,92	1,67	1,27	2,07	1,27	1,17
Dimensi PARTISIPASI	2,28	1,56	1,39	1,00	1,22	1,22	1,17	1,67	1,72	1,89	1,78	1,72

Terkait penyelenggaraan ini, ada satu kasus pidana yang dilakukan oleh panwas di Kab. Sidrap yang menjadi alasan indeks kerawanan Pemilu di kabupaten tersebut cenderung tinggi. Sayangnya pada tabel di atas tidak menjadikan Kabupaten Takalar sebagai salah satu sampel padahal ada beberapa konflik pemilu di Kab. Takalar yang tergolong urgent. Seperti yang dikutip dalam sebuah berita online iputan6.com, pasangan petahana pilkada Takalar, Sulawesi Selatan Burhanuddin Baharuddin - Muh Natsir Ibrahim akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Kamis (23/2/2017).

Langkah tersebut dilakukan setelah tim pemenangan menemukan tujuh dugaan pelanggaran pilkada di Kabupaten Takalar pada Rabu 15 Februari 2017.

Tujuh pelanggaran tersebut yakni dugaan adanya pemilih memilih lebih dari dua kali dan memilih bukan di Tempat Pemungutan Suara yang sesuai wilayahnya. Pelanggaran lainnya yaitu, dugaan menggunakan formulir C6 yang



bukan miliknya, pemilih di bawah umur, pemilih ditemukan bukan warga Kabupaten Takalar, diduga ada oknum KPPS di TPS merusak surat suara, serta dugaan pemilih siluman sebanyak 5.846 pemilih yang tersebar merata di 351 TPS se Kabupaten Takalar.

Penghitungan suara yang berlangsung di Kantor KPUD Takalar sempat terjadi perdebatan antara saksi pasangan petahanan dengan pihak KPUD Takalar dan akhirnya saksi pasangan petahana memutuskan menarik diri saat rapat pleno rekapitulasi suara berlangsung.

Hasil penghitungan suara pilkada 2017 oleh KPUD Takalar, pasangan lawan petahana Syamsari Kitta - Achmad Daeng Se're unggul dengan perolehan suara 88.113 suara. Sementara pasangan petahana Burhanuddin Baharuddin - Muh Natsir Ibrahim peroleh suara 86.090 suara.

Hasil Rekapitulasi perolehan suara KPU Takalar sebagai berikut:

Paslon 1: Baharuddin Burhanuddin-Muh Natsir Ibrahim

Paslon 2: Syamsari Kitta-Achmad Daeng Serre

- Kecamatan Mappakasunggu

Paslon nomor 1 : 5.151 suara

Paslon nomor 2 : 4.505 suara

Suara sah : 9.656 suara

Tidak sah : 57 suara

Jumlah suara sah + tidak sah : 9.713 suara

- Kecamatan Polongbangkeng Selatan

Paslon nomor 1 : 9.635 suara

Paslon nomor 2 : 7.610 suara

Suara sah : 17.245 suara

Tidak sah : 117 suara

Jumlah suara sah + tidak sah : 17.362 suara

- Kecamatan Polongbangkeng Utara

Paslon nomor 1 : 15.651 suara

Paslon nomor 2 : 14.287 suara

Suara sah : 29.938 suara

Tidak sah : 239 suara

Jumlah suara sah + tidak sah : 30.177 suara

- Kecamatan Galesong Selatan

Paslon nomor 1 : 7.291 suara

Paslon nomor 2 : 8.486 suara

Suara sah : 15.777 suara

Tidak sah : 122 suara

Jumlah suara sah + tidak sah : 15.899 suara

- Kecamatan Galesong Utara

Paslon nomor 1 : 10.717 suara

Paslon nomor 2 : 12.987 suara

Suara sah : 23.704 suara



Tidak sah : 160 suara

Jumlah suara sah + tidak sah : 23.864 suara

- Kecamatan Pattallassang

Paslon nomor 1 : 11.624 suara

Paslon nomor 2 : 10.506 suara

Suara sah : 22.130 suara

Tidak sah : 109 suara

Jumlah suara sah + tidak sah : 22.239 suara

- Kecamatan Sanrobone

Paslon nomor 1 : 4.332 suara

Paslon no.2 : 4.593 suara

Suara sah : 8.925 suara

Tidak sah : 91 suara

Jumlah suara sah + tidak sah : 9.016 suara

- Kecamatan Galesong

Paslon nomor 1 : 9196 suara

Paslon nomor 2 : 15.334 suara

Suara sah : 24.530 suara

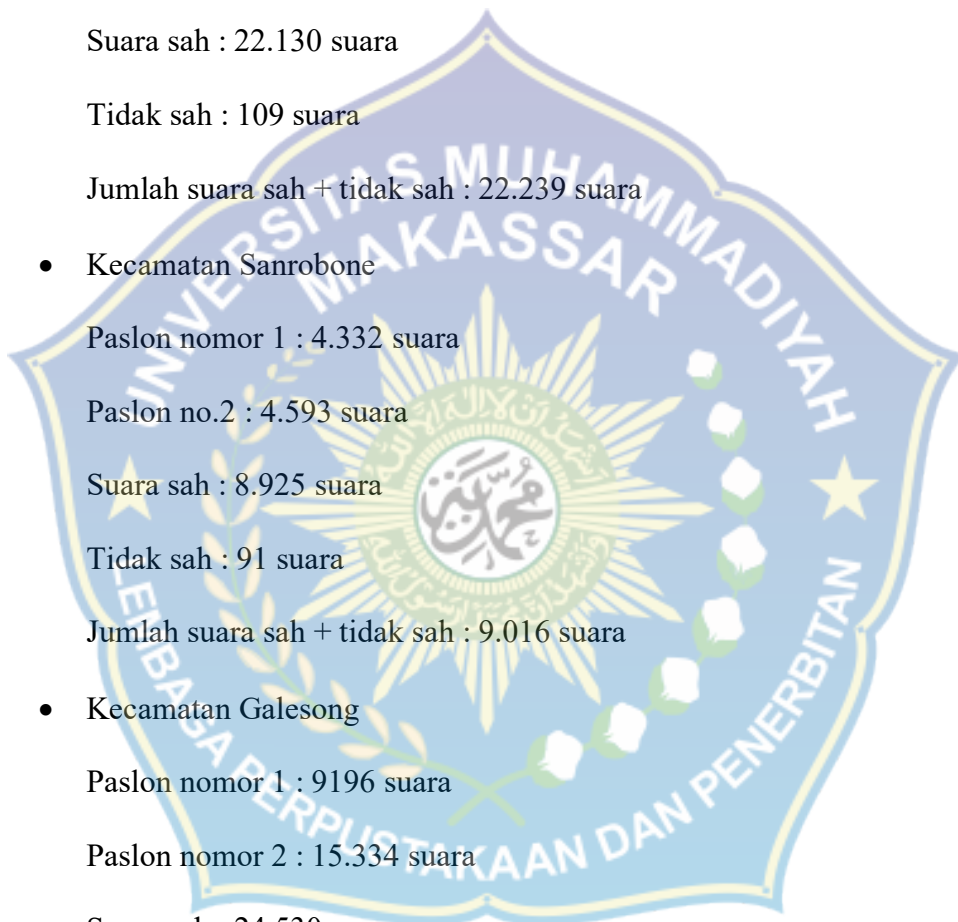
Tidak sah : 149 suara

Jumlah suara sah + tidak sah : 24.679 suara

- Kecamatan Mangarabombang

Paslon nomor 1 : 12.493 suara

Paslon nomor 2 : 9.805 suara



Suara sah : 22.298 suara

Tidak sah : 167 suara

Jumlah suara sah + tidak sah : 22.456 suara.

- Adapun hasil rekapitulasi tingkat KPU Kab Takalar adalah :
  - a. Paslon nomor 1 : 86.090 suara
  - b. Paslon nomor 2 : 88.113 suara

Demikian pula yang peneliti rangkum dalam sebuah wawancara bersama Bapak Anzar Hasanuddin, beliau menjabat sebagai staf Sekretariat KPU saat ini. Tidak hanya itu, peneliti juga telah melakukan wawancara bersama seorang Komisioner KPU yakni Bapak Muh. Arfah. Keduanya menjelaskan tentang bagaimana konflik yang terjadi pada Pilkada Kab. Takalar tahun 2017.

*“Saat itu ada isu yang beredar tentang pemilih yang tidak tervalidasi dikarenakan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bukan merupakan DPT Kab. Takalar. Nomor KTP yang tidak sesuai dengan format juga banyak ditemukan oleh Bawaslu pada saat itu. Paslon pertahanan yang kalah pada saat itu yakni DR. H. Burhanuddin Baharuddin – H. Natsir Ibrahim tidak mau menerima kealahannya, sehingga membawa masalah ini ke jalur hukum yaitu mengajukan Permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengacara pemohon gugatan, menyebut telah terjadi sejumlah kecurangan yang menyebabkan pasangan tersebut kalah berdasarkan rekapitulasi suara KPUD Kabupaten Takalar.”*

Narasumber memaparkan bahwa terdapat pelanggaran – pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Kabupaten takalar, Muh Arfah sebagai Komisioner KPU Kabupaten Takalar mejelaskan hal tersebut.

*“Ada tiga temuan pelanggaran dalam Pilkada di Kabupaten Takalar, yakni pertama, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kedua, terjadi mobilisasi massa yang berasal dari Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Takalar. Dugaan kecurangan ketiga dan yang paling mencolok yaitu ditemukannya 5.486 pemilih yang ada di dalam Daftar Pemilih*

*Tetap tetapi tidak terdaftar di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar.”*

Hal ini sesuai dengan faktor yang menjadi penyebab adanya konflik yaitu **“Hubungan Masyarakat”** karena adanya polarisasi yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki kepercayaan yang baik terhadap hasil Pilkada Kabupaten Takalar. Point ini juga didukung oleh statement yang di keluarkan oleh timses Paslon Burhanuddin-Natsir sebagai paslon yang kalah dalam Pilkada Kabupaten Takalar 2017, **Daeng Nompo** menyatakan bahwa

*“ada yang curang pada pemilu kali ini, pasangan calon sebelah mengumpulkan massa dari luar kabupaten Takalar untuk mencoblos atau biasa disebut dengan pemilih siluman, banyak lagi yang lain, mulai dari kesalahan DPT, dan banyaknya pemilih dibawah umur yang dapat memilih”*

Dapat dilihat dari statement diatas muncul ketidakpercayaan akan hasil Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU sehingga terjadi penolakan pada masyarakat, hal ini pun direspon oleh pendukung atau timses Paslon pasangan Syamsari-Achmad, **Satria Dabar** yang ikut mengomentari hal pelanggaran – pelanggaran yang dinyatakan oleh pasangan Burhanuddin-Natsir,

*“Kita sebagai masyarakat tinggal menghormati keputusan KPU walaupun terjadi pelanggaran – pelanggaran seperti yang disebutkan, akan ada proses yang dapat memutuskan yang mana benar dan mana yang salah.”*

Pasangan Burhanduddin-Natsir yang disung oleh sembilan partai besar kalah tipis dari pesaingnya, Syamsari- Achmad DG Sere, yang hanya diung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem. Pasangan calon nomor urut 2 tersebut berhasil meraih 88.113 suara atau 50,72 persen. Sementara pasangan Burhanuddin-Natsir meraih 86.090 suara atau 49,82 persen. Selisih suara itu, kata Daeng Nompo, menjadi alasan lain pasangan itu mendaftarkan sengketa Pilkada ke MK.



Konflik lain juga terjadi pada saat sebelum dan setelah Pilkada, masyarakat yang sudah mengenal sosial media seperti Facebook, banyak masyarakat yang menulis opini mereka di sosial media sehingga terjadi gesekan antara pendukung kedua pasangan calon, hal ini juga diutarakan oleh **Arifin, S.Sos** selaku Sekretaris Panwas Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar

*“Kalau di Takalar, alhamdulillah konflik tidak terlalu nampak di dunia nyata karena semua masih pegang yang namanya siri’ na pacce, tapi kalau saya liat di sosial media memang banyak sekali komentar yang kasar kalau ada yang mendukung salah satu paslon, tapi itu sampai di komentar saja, tidak berlanjut di dunia nyata sampai saling menyerang atau apalah”*

Penyebab dalam konflik ini termasuk dalam **Negosiasi Prinsip**, karena terdapatnya perbedaan pandangan oleh kedua pendukung pasangan paslon, mereka saling menjunjung pasangan yang mereka dukung dan menjelekkan pasangan lawan.

Penyebab konflik ketiga yaitu **Kebutuhan Manusia** mengarah kepada kepentingan - kepentingan personal seseorang sehingga mendukung salah satu paslon, Hal ini tidak terlalu nampak dalam rana Pilkada Kabupaten Takalar tahun 2017 tapi peneliti melihat adanya perebutan jabatan Aparatur Sipil Negara bahwasanya pejabat – pejabat mendukung paslon agar mendapat jabatan yang diinginkan ataupun mempertahankan jabatan yang telah dipegang saat ini. Hal ini didukung oleh statement Pak Arifin, pak arifin mengatakan bahwa pasti ada kepentingan – kepentingan dibalik dukungan dari pada kedua pasangan paslon, tidak terkecuali dengan ASN atau PNS, ada yang mau jabatan baru jika pasangan

tertentu menang sehingga orang ini mendukung pasangan tersebut tapi tidak terlalu mencolok karena adanya aturan dimana PNS harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

### C. Tata kelola konflik dalam pilkada serentak Kabupaten Takalar

Setelah banyaknya isu yang menyudutkan Bawaslu Kab. Takalar terkait Pemilu tahun 2017 akhirnya Bawaslu angkat bicara dan berusaha mengelola konflik Pemilu yang terjadi saat itu. Mulai pengumpulan data dan informasi dari berbagai sudut pandang sampai mengevaluasi hasil Pilkada telah dilakukan.

Dalam aspek evaluasi pengawasan, melakukan pendekatan isu-isu yang dievaluasi yaitu :

1. Politik Uang (*money politic*), pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif
2. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyalahgunaan Program Pemerintah (Bansos) dan Mutasi.
3. Hak-hak pemilih (partisipasi, DPT, disabilitas, pemilih ganda)
4. Dana-dana kampanye (Lembaga akuntan publik)
5. Evaluasi IKP Pilkada 2017

Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengelola konflik-konflik diatas.

#### a. Politik dan uang

merupakan pasangan yang sangat sulit dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye pemilu. Relasi kuat antara 'politik dan uang' dipengaruhi oleh, dan memengaruhi, hubungan antara politisi, keanggotaan partai, dan pemilih. Timbulnya masalah uang bagi demokrasi karena banyak kegiatan politik yang harus dilaksanakan menggunakan uang. Dalam hal ini, 'politik dan uang' cenderung diartikan sempit karena hanya fokus pada dana kampanye partai politik.

Bawaslu sebagai dirijen utama penyelenggara pemilu, mesti memiliki peta jalan politik uang. Kampanye politik uang juga harus mulai ditata rapi berdasarkan segmentasi gender, pendidikan, pekerjaan, serta demografi. Sehingga, isu yang disasar akan lebih tepat sasaran dan diharapkan memiliki daya manfaat besar bagi kepentingan demokrasi Indonesia. Berbagai cara ditempuh harus diambil penyelenggara pemilu agar praktik politik uang dapat diminimalisir. Seperti dengan merangkul otoritas lain yang mempunyai minat sama dalam menciptakan kultur demokrasi sehat dan pemerintahan bersih. Sebut saja BI, PPATK, dan OJK. Keikutsertaan mereka dalam upaya itu menjadi semangat baru bagi Bawaslu dalam melakukan perang terbuka bagi pelaku uang. Selain itu, kampanye dan model pelaporan cepat berbasis IT, Gowaslu. Masyarakat sebagai ujung tombak dan mitra Bawaslu harus dimudahkan dalam memberikan informasi politik uang. Harapannya, untuk mempercepat proses arus informasi dan mitigasi dari keberadaan politik uang. Di sisi lain, apabila hal tersebut dapat dipenuhi atau diakomodir Bawaslu maka pekerjaan peningkatan partisipatif masyarakat akan meningkat dengan sendirinya. Dengan begitu,

kualitas hajatan demokrasi seperti pemilu dapat meningkat dengan berkurangnya frekuensi kasus politik uang.

KPU kabupaten Takalar mengomentari tentang budaya politik uang di kabupaten Takalar tidak menimbulkan konflik yang nyata di masyarakat.

*“Kalau kita berbicara tentang konflik karena politik uang di Takalar tidak terlalu nampak, hal ini disebabkan karena kedua tim sukses pasangan calon melakukan hal yang sama namun tidak terlalu besar jumlahnya, sehingga masyarakat memahaminya”*

Dengan pernyataan diatas, tata kelola konflik ataupun management konflik yang dipakai oleh KPU adalah Kompromi, karena kedua belah pihak melakukan hal yang sama sehingga tidak terjadi konflik yang nyata di masyarakat.

#### **b. Hak-hak Pemilih**

Daftar pemilih menjadi permasalahan klasik yang selalu muncul dalam pemilihan umum, baik pemilihan umum eksekutif (Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati) maupun legislatif. Permasalahan klasik inilah yang selalu menjadi bahan persidangan di Mahkamah Konstitusi bagi kelompok atau partai yang kalah dalam pemilihan umum.

Dengan adanya permasalahan yang selalu muncul inilah Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara pada tahun 2004 menegaskan bahwa akan menjadi pelanggaran jika penyelenggara pemilu telah melakukan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak memilih pada warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional. Dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2017, kriteria dasar daftar pemilih

tidak jauh berbeda dengan pemilihan presiden ataupun legislatif. Kriteria dasar tersebut ialah Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin<sup>25</sup> dan pensiunan TNI/Polri.

Kriteria dasar dalam menentukan pemilih inilah yang kemudian mengkategorikan pemilih menjadi tiga, yakni Pemilih terdaftar yang berhak, Pemilih terdaftar yang tidak berhak, dan Pemilih yang berhak namun potensial tidak terdaftar (Asy'ari: 2012).

Berdasarkan temuan di atas dan untuk mendukung pemilu akses, AGENDA merekomendasikan poin-poin berikut: 1. Petugas pemilu dan seluruh pemangku kepentingan harus menyediakan informasi bagi penyandang disabilitas melalui program pendidikan pemilih dan materi kampanye yang terarah di tiap tahap pemilu, disediakan oleh seluruh petugas kepegiluan, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, parpol, dan calon. Materi tersebut harus disediakan dalam berbagai format yakni tertulis, audio, visual, interaktif, dan non-interaktif. Saat pendidikan pemilih disiarkan di televisi, harus disediakan ahli bahasa isyarat bagi yang tuna rungu. Petugas pemilu harus melibatkan organisasi yang bekerja dengan isu disabilitas sebagai mitra kooperasi.

Media di Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mewawancarai dan mengikutsertakan penyandang disabilitas sebagai bagian dari pelaporan kegiatan pemilu. Kampanye media yang mendidik dan bernuansa positif juga harus ada untuk membantu menanamkan pandangan yang benar bahwa penyandang disabilitas, keluarga, dan kepala daerah bahwa penyandang disabilitas memiliki



hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik komunitas mereka, termasuk menggunakan hak pilihnya.

Meningkatkan kapasitas petugas pemilu di tingkat lokal untuk mengumpulkan data disabilitas, khususnya bagi petugas pemutakhiran data (Pantarlih) dan petugas di tingkat kelurahan/desa (PPS). Proses penyusunan DPT harus mengumpulkan data terkait jenis disabilitas dengan cara menggunakan kolom keterangan yang ada di formulir pengumpulan data. Petugas di tingkat kelurahan/desa (PPS) dan petugas KPU harus memastikan bahwa data disabilitas dikumpulkan dan disertakan dalam seluruh jenis daftar pemilih.

Untuk memastikan bahwa petugas pemilu (khususnya PPS) dan staf TPS (KPPS) harus: (a) memilih lokasi TPS yang dapat diakses sebagaimana diatur dalam UU yang berlaku di Indonesia; (b) memahami aturan formulir Model C3 PPWP yang harus diisi asisten penyandang disabilitas; (c) memahami fungsi dan kegunaan template Braille; dan (d) siap mendukung penyandang berbagai jenis disabilitas di TPS – untuk ini, harus ada satu sesi pelatihan yang sepenuhnya tentang isu aksesibilitas bagi staf tingkat lokal.

Petugas pemilu harus mengatur dan membangun lingkungan pemungutan suara yang akses di TPS, misalnya, pencahayaan yang cukup, adanya arahan tentang bagaimana cara mencoblos yang dicetak dalam kertas dan huruf berukuran besar, adanya pengarahannya secara lisan dan tertulis tentang proses pemungutan suara, serta adanya sinyal visual dan verbal untuk memanggil pemilih yang tuna netra atau tuna rungu.

Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan misalnya para LSM, aktivis, dan penyelenggara pemilu seperti KPU untuk mengarusutamakan isu disabilitas dalam pemilu melalui program.

Dalam hal konflik yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Takalar, Pihak Bawaslu dan KPU juga merespon terhadap segala bentuk pelanggaran yang di ajukan oleh pihak Burhanuddin-Natsir, Pihak KPU dan Bawalu segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam pelanggaran – pelanggaran yang diajukan oleh pihak pasangan Burhanuddin-Natsir seperti, dugaan adanya pemilih siluman, Nomor Induk KTP yang tidak sesuai dengan format, Pak Arfah selaku Komisioner KPU mengatakan bahwa

*“Permasalahan di MK, yang Pemilih siluman yang katanya ada sekitar ribuan pemilih siluman yang di permasalahan dalam sidang MK, di database katanya banyak data yang tidak sesuai dengan sistematika penulisan NIK, karena setiap daerah mempunyai kode urut sendiri sendiri seperti takalar yang dimulai dengan awalan 73”*

*“Pada saat Coklit, banyak ditemukan warga yang tidak memiliki KTP, dan dicatat tanpa NIK, setelah sekian ribu data dmasuk, diusulkan ke Kemendagri kemudian Mendagri mengeluarkan NIK untuk warga tersebut itulah yang mereka anggap pemilih siluman karena NIKnya berbeda dengan NIK pada umumnya di Takalar.”*

Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan hak pemilih dalam pilkada di kabupaten Takalar, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan data

warga sehingga warga yang tidak mempunyai NIK akan mendapatkan hak yang sama dengan warga yang mempunyai NIK.

Selain itu Pak Arfah juga menanggapi ajuan yang mengarah pada adanya mobilisasi penduduk luar kabupaten Takalar untuk mencoblos salah satu pasangan. Hal ini juga langsung dijelaskan oleh KPU dan Bawaslu bahwa orang-orang yang mencoblos itu adalah warga Takalar dan mempunyai KTP Takalar, namun mereka tidak menetap di Takalar karena bekerja di luar daerah ataupun memiliki istri atau suami di daerah yang berbeda sehingga warga sekitar melihat mereka asing karena jarang berada di lingkungan tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang peneliti dapatkan, dapat dipaparkan bahwa Suatu konflik politik dapat dilihat dalam suatu fenomena dalam perbedaan antar kelompok yang ada da

Dalam Pilkada Kab. Takalar 2017. Peneliti menemukan tidak terdapat konflik yang terjadi sebelum Pilkada dimulai, tetapi terdapat beberapa konflik setelah Pilkada dimulai.

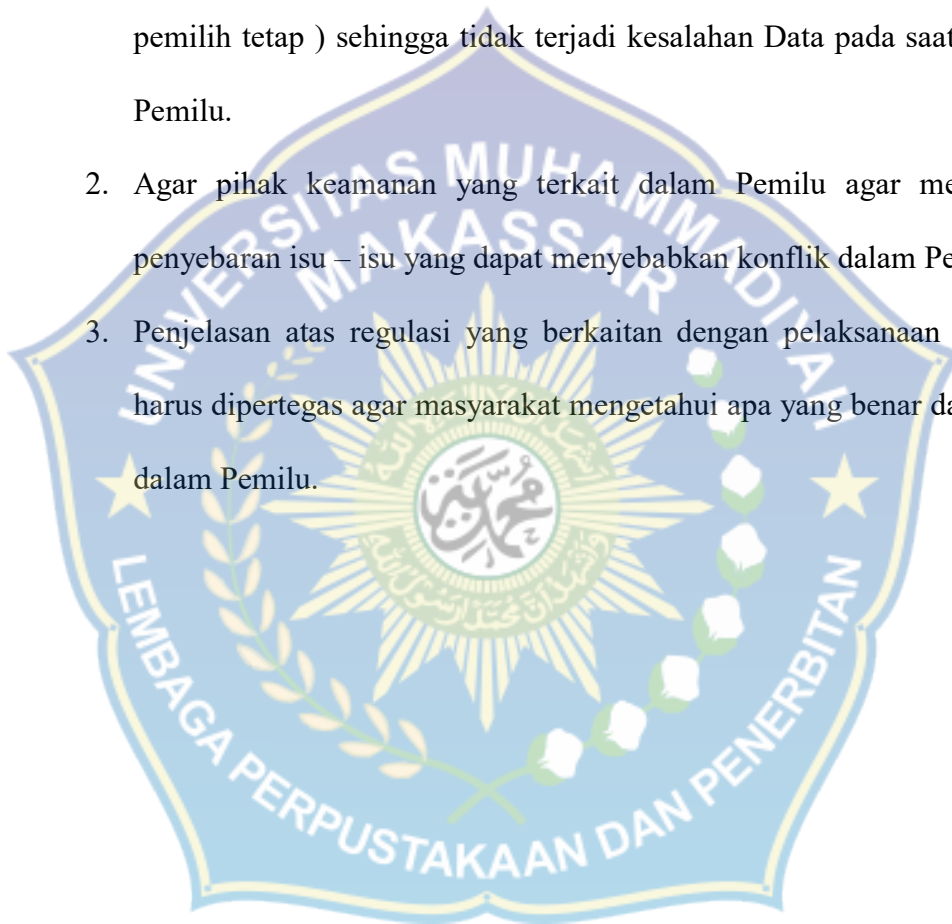
Konflik yang terdapat pada Pilkada serentak Kab. Takalar tahun 2017 antara lain yaitu adanya isu tentang pemilih yang tidak tervaidasi (KTP luar Kab. Takalar) dan nomor KTP yang tidak sesuai dengan format. Adapun pelanggaran sebagai salah satu penyebab konflik yang ada yaitu adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, terjadinya mobilisasi massa dan terdapatnya 5.486 pemilih yang ada di dalam DPT (daftar pemilih tetap) tetapi tidak terdaftar dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar.

Adapun Tata kelola konflik dalam pilkada serentak Kab. Takalar, dalam aspek pengawasan, bawaslu melakukan pendekatan terhadap isu - isu yang terkait, seperti Politik Uang, netralitas ASN, Hak hak Pemilih, dana – dana kampanye dan evaluasi IKP Pilkada 2017.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada pemerintah bahwa :

1. Untuk pihak terkait dalam Pilkada ataupun Pemilu secara umumnya agar dapat memperbaiki Evaluasi dan Verifikasi terhadap DPT ( daftar pemilih tetap ) sehingga tidak terjadi kesalahan Data pada saat hari H Pemilu.
2. Agar pihak keamanan yang terkait dalam Pemilu agar mencegah penyebaran isu – isu yang dapat menyebabkan konflik dalam Pemilu.
3. Penjelasan atas regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada harus dipertegas agar masyarakat mengetahui apa yang benar dan tidak dalam Pemilu.





## DAFTAR PUSTAKA

Demmers, Jole. 2012. *Theories of Violent Conflict. An Introduction*. Routledge. USA. 155 hlm.

Gatara A.A, Said dan Said, Moh. Dzulkiah. 2007. *Sosiologi Politik. Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. CV Pustaka Setia. Bandung. 260 hlm.

Haris, 2005, *Mengelola Potensi Konflik Pilkada*, Kompas tanggal 10 Mei 2005i.

Lianto. 2010. Aktualisasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow Bagi Peningkatan Kinerja Individu Dalam Organisasi. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Pontianak*. 36 hlm.

Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. CV Alfabeta. Bandung. 234 hlm.

Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi. *Sengketa dan Penyelesaiannya*. (Jakarta: Indonesian Center For Enviromental Law, 1977). Hal. 24

Sukardi. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV Alfabeta. Bandung. 334 hlm.

T.Tani Handoko “*Manajemen Personalialia Dan Sumberdaya Manusia*” Penerbit Universitas Gajah Mada, Yoqyakarta 2001, Edisi 2

Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*. Salemba Humanika. Jakarta. 293 hlm.

## RIWAYAT HIDUP



**FIRMADI MUSLIMIN**, Lahir di Takalar pada Tanggal 14 April 1994. Anak Kedua dari pasangan Drs. H. Muslimin dan Hj. ST. Hatija, S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN BIRINGBALANG NO. 45 TAKALAR pada tahun 2006. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 2 TAKALAR dan tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 3 TAKALAR dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2019 ini akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul **“TATA KELOLA KONFLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2017”**.